

GAMBARAN KEWARGAAN DIGITAL PADA SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI BERDASARKAN PERSPEKTIF GENDER

Ricca Angreini Munthe

Raihani

Harris Simaremare

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Ricca.angreini@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

The rapidly developing digital media has currently been forcing every individual to become a digital citizen. Not exceptionally, students who are at the stage of adolescent development are considered active digital citizens. Research has shown that male students access social media more often than female students. However, it remained unknown how both male and female students in Indonesia develop digital citizenship. This study aims to explore differences in the ability of digital citizenship in two State Islamic High School's (MAN) students in terms of gender. The study used a mixed method approach sampling 394 students from two madrasah in Bandung. In the quantitative phase, a survey questionnaire was distributed to the sampled students from which six groups of students were selected to participate in the qualitative phase. An FGD was conducted with each of the six groups to understand further their ability in digital citizenship. The results showed female students' ability in digital citizenship is higher than male. Both male and female students are strong in the aspect of digital security; but they are weak in digital wellbeing and digital civic engagement respectively. This study hopefully contributes to the curriculum development in MAN by taking into account the differences in order to create more effective digital citizens.

Keyword: *digital citizenship, female, male*

ABSTRAK

Media digital yang berkembang pesat saat ini memaksa setiap individu menjadi warga digital. Tidak terkecuali, siswa yang berada pada tahap perkembangan remaja dianggap aktif sebagai warga digital. Penelitian menunjukkan bahwa laki-laki mengakses media sosial lebih sering dibandingkan perempuan. Meskipun demikian, belum dapat diketahui bagaimana siswa laki-laki dan perempuan di Indonesia mengembangkan kewargaan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menggali perbedaan kemampuan kewargaan digital pada Siswa Madrasah Aliyah Negeri berdasarkan perspektif gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* dengan jumlah subjek sebanyak 394 siswa dari dua MAN yang ada di Kota Bandung. Pada tahap penelitian kuantitatif, kuesioner dibagikan kepada subjek penelitian dan enam kelompok dipilih menjadi partisipan pada tahap kualitatif. FGD dilakukan pada setiap kelompok yang dipilih untuk memahami lebih lanjut kemampuan kewargaan digital subjek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kewargaan digital siswa perempuan lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki. Baik siswa laki-laki maupun perempuan kuat pada aspek *digital security*; tetapi mereka lemah dalam hal *digital wellbeing* dan *digital civic engagement respectively*. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan kurikulum di MAN dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan agar tercipta kewargaan digital yang lebih efektif.

Kata Kunci: kewargaan digital, laki-laki, Madrasah Aliyah Negeri, perempuan

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi digital semakin hari semakin pesat, hal ini ditandai dengan semakin intens penggunaan peralatan digital seperti *smartphone*, laptop, komputer yang dapat dengan mudah terkoneksi dengan internet sehingga penyebaran informasi dan komunikasi menjadi sangat cepat. Meskipun pengguna alat digital berasal dari kalangan dan usia mana saja, namun remaja adalah pengguna alat digital yang paling banyak, mereka mengakses internet untuk menyelesaikan tugas, berkomunikasi dengan teman, bermain *games* dan mengakses berita mengenai gossip para artis (Hinduja & Patchin, 2014). Keterlibatan remaja dalam dunia digital menjadikan remaja sebagai warganegara digital.

Digital citizenship atau kewargaan digital merupakan suatu konsep mengenai bagaimana seseorang dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi secara baik dan bertanggungjawab (Searson, Hancock, Soheil, & Shepherd, 2015). Sedangkan warga digital adalah seseorang yang terlibat secara aktif dan bertanggungjawab dalam komunitas *online* maupun *offline*, lokal, nasional, ataupun global (Mattson & Curran, 2018). Namun, banyak fenomena yang justru menunjukkan bahwa remaja belum memiliki kemampuan sebagai warga negara digital sebagaimana seharusnya. Misalnya, banyak siswa yang menggunakan media internet untuk melakukan tindakan *bullying* atau yang sering dikenal sebagai *cyberbullying*, merusak relasi sosial, dan menciptakan konflik yang mengancam persatuan dan kesatuan (Mardianto, 2018). Fenomena ini menimbulkan dampak negatif terutama pada korban: mereka merasa marah, sedih, depresi, frustrasi, tidak percaya diri, takut kesekolah, kesulitan ekonomi, permasalahan keluarga, bahkan ada yang ingin bunuh diri (Hinduja & Patchin, 2014).

Kondisi di atas tidak dapat diselesaikan hanya dengan melarang dan membatasi keterlibatan remaja dalam dunia digital. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menanamkan dan meningkatkan kemampuan kewargaan digital pada mereka (Mardianto, 2018). Seseorang dianggap sebagai warganegara digital yang baik adalah ketika mempunyai kemampuan dalam setiap aspek kewargaan digital itu. Menurut Ribble (2011), terdapat sembilan aspek kewargaan digital:

1. *Digital access* yaitu kesempatan yang dimiliki oleh setiap individu untuk berpartisipasi pada masyarakat digital.
2. *Digital commerce*, yaitu transaksi produk melalui media elektronik.
3. *Digital communication*, yaitu pertukaran informasi melalui media digital.
4. *Digital literacy*, yaitu proses belajar dan mengajar mengenai teknologi dan penggunaannya.
5. *Digital etiquette*, yaitu standar elektronik mengenai etika.
6. *Digital law*, yaitu tanggungjawab elektronik terhadap perbuatan dan tingkahlaku.

7. *Digital right and responsibility*, yaitu prasyarat-prasyarat dan kebebasan diperluas kepada setiap orang dalam sebuah masyarakat digital.
8. *Digital health and wellness*, yaitu kesejahteraan psikologis dan fisik dalam dunia teknologi digital.
9. *Digital security*, yaitu kehati-hatian elektronik untuk menjamin keamanan.

Kemampuan kewargaan digital tidak muncul begitu saja karena teknologi digital yang semakin pesat dan bersifat *disruptive* meniscayakan upaya penanaman akan aspek-aspek kewargaan digital di segala konteks termasuk yang utama adalah pendidikan formal di sekolah (Mattson & Curran, 2018). Pentingnya pengembangan kemampuan kewargaan digital ini diungkap oleh, antara lain, Gayatri, dkk (2015) yang menemukan bahwa para remaja rentan terhadap perundungan di dunia maya. Para peneliti ini menganjurkan perlu adanya kebijakan mengenai hak anak dan remaja dalam mengakses, mengekspresikan dan membagikan informasi dalam konteks keamanan digital.

Selain kerangka Ribble di atas, Jones dan Mitchell (2015) mengembangkan kerangka kewargaan digital sebagai salah satu fokus pendidikan yang tidak mengutamakan “*fear-based strategies*” (strategi berbasis ketakutan). Kerangka ini terdiri dari dua aspek utama, yaitu: 1. Menunjukkan perilaku online yang penuh hormat dan toleran; dan 2. Mempraktekkan keterlibatan kewargaan *online*. Mereka berargumen bahwa kewargaan digital harus sejalan dengan konsep *youth citizenship* yang menekankan pada kesadaran sebagai warga dunia yang beragam dan menjunjung tinggi keadilan, persamaan, dan pluralisme.

Dalam studi ini, peneliti menggunakan modifikasi dari Ribble (2011) dan Jones and Mitchell (2015) serta mempertimbangkan aspek budaya dan agama karena menurut Searson, dkk. (2015), konsep dan kerangka kewargaan digital dapat saja bergantung kepada konteks di mana ia dikembangkan dan diimplementasikan seperti memasukkan unsur-unsur agama dan budaya setempat. Modifikasi dengan memasukkan komponen agama dan budaya adalah untuk mengetahui sejauh mana agama dan budaya lokal dapat menjadi sumber nilai bagi pengguna digital dalam aktifitasnya. Setelah modifikasi ini, maka kewargaan digital yang digunakan sebagai konsep operasional penelitian ini terdiri dari tujuh aspek yaitu *digital wellbeing*, *digital right and responsibility*, *digital security*, *digital etiquette*, *digital diversity and tolerance*, *digital civic involvement* dan *digital religious and cultural foundation*.

Digital wellbeing merupakan kemampuan dalam menyadari pengaruh teknologi digital terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis mereka. *Digital right and responsibility* kemampuan dalam memahami hak untuk akses terhadap teknologi digital dan terlibat dalam masyarakat

digital; memahami tanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital baik terhadap diri sendiri atau orang lain. *Digital security* kemampuan dalam memelihara keamanan baik alat teknologi digital maupun diri sendiri dan juga orang lain. *Digital etiquette merupakan* kemampuan para siswa dalam mengetahui dan melaksanakan norma dan kode etik menggunakan teknologi digital; dan kemampuan mereka menjunjung tinggi norma dan etika dalam berinteraksi dengan orang lain secara digital. *Digital diversity and tolerance* merupakan kemampuan para siswa memahami dan menghargai keragaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan dunia; dan kemampuan bertoleransi terhadap perbedaan baik agama, etnis, dan budaya yang terekspos kepada mereka melalui dunia digital. *Digital civic involvement* merupakan kemampuan para siswa terlibat secara aktif dalam dunia digital dalam perbincangan tentang peran mereka sebagai warga negara yang baik; kemampuan mereka terlibat aktif dalam berperan mewujudkan upaya membangun masyarakat dan bangsa sekitar dan umum. *Digital religious and cultural foundation* merupakan kemampuan menggunakan ajaran agama dan nilai-nilai budaya dalam menggunakan teknologi digital; dan kemampuan menggunakan ajaran agama dan nilai-nilai budaya dalam berinteraksi secara digital.

Dalam kewargaan digital, perbedaan gender ternyata berpengaruh terhadap perilaku menggunakan media digital. Menurut Gayatri dkk. (2015), meskipun secara keseluruhan siswa dapat dianggap sebagai warga digital yang baik, namun remaja laki-laki lebih sering mengakses internet daripada perempuan. Sementara itu, perempuan lebih menunjukkan sikap hormat dalam media digital dan terlibat secara aktif dalam menjalankan perannya sebagai warga negara dalam dunia digital dibandingkan laki-laki (Jones & Mitchell, 2016). Demikian juga, terdapat perbedaan gaya hidup bersosial media antara remaja laki-laki dan perempuan. Perempuan lebih sering melakukan pembicaraan di media sosial, menggunakan twitter, mengedit dan memposting foto, merasa khawatir terlihat jelek di media sosial dan kadang merasa ditinggalkan ketika melihat foto oranglain bersama di media online (Backgrounder, 2012).

Mengenai perbedaan ketersediaan akses digital antara laki-laki dan perempuan, Azali dan Damayanti (2019) menjelaskan bahwa perempuan sebenarnya memiliki potensi dalam teknologi digital, namun kesempatan mereka untuk memperkuat literasi digital lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan karena perempuan dipandang sebagai individu yang rentan terhadap kejahatan digital sehingga kesempatan untuk akses digital bagi mereka dikurangi terutama oleh orangtua agar mereka tidak terlalu sering terpapar. Tentu saja, hal ini bukanlah solusi terbaik mengingat bahwa dunia digital merupakan dunia yang tidak terelakkan bagi setiap individu apapun jenis kelamin mereka. Dalam hal ini, kemampuan kewargaan digital merupakan hal yang penting untuk dikembangkan pada setiap siswa termasuk siswa-siswi MAN seperti yang diadvokasikan oleh penelitian ini.

METODE

Penelitian lapangan untuk studi ini dilakukan di dua MAN Bandung. Terdapat beberapa alasan mengenai pentingnya penelitian kewargaan digital di Madrasah Aliyah. *Pertama*, siswa Madrasah Aliyah juga merupakan warga digital karena mereka juga terlibat dalam penggunaan media digital baik di dalam maupun di luar sekolah. *Kedua*, MAN adalah lembaga pendidikan yang memuat lebih banyak mata pelajaran agama dibandingkan dengan sekolah umum sehingga muncul asumsi bahwa aspek agama mungkin akan mengemuka dalam temuan. *Ketiga*, Kota Bandung dipilih karena dianggap sebagai salah satu kota di mana perkembangan teknologi dan informasi sangat pesat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian metode campuran atau *mixed methods*. Pada fase kuantitatif dan khusus untuk artikel ini, metode komparasi digunakan untuk membandingkan kemampuan kewargaan digital pada siswa perempuan dan laki-laki. Subjek penelitian adalah siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 dan 2 Kota Bandung yang berjumlah 394 orang dengan sebarannya seperti pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sebaran Sampel Padan MAN 1 dan 2

	MAN 1	MAN 2	Jumlah
<i>Laki-Laki</i>	78	63	141
<i>Perempuan</i>	123	130	253
<i>Total Sampel</i>			394

Pengambilan sampel untuk setiap sekolah dilakukan secara *purposive* (Creswell, 2012), yaitu para siswa kelas XI dengan alasan bahwa mereka tidak sedang menghadapi ujian akhir dan cukup dewasa untuk memberikan informasi yang diperlukan. Seperti dikemukakan sebelumnya, kerangka operasional yang dipakai adalah hasil modifikasi dari Ribble (2011) dan Jones and Mitchel (2015) yang terdiri dari 7 aspek kewargaan digital yang berisi 40 aitem pertanyaan. Instrumen ini diujicobakan di MAN Pekanbaru dengan jumlah responden sebanyak 67 siswa. Validitas alat ukur adalah validitas isi dengan menggunakan penilaian dari *professional judgement*. Sedangkan untuk melihat kualitas aitem, Rasch Model digunakan karena alat ukur ini merupakan alat ukur untuk mengukur kemampuan (Sumintono dan Widiharo, 2015). Hasil analisis rasch model menunjukkan bahwa terdapat 14 aitem fit sedangkan 25 misfit, 2 aitem kualitatif sehingga tidak dapat diuji. Delapan aitem dari 25 aitem misfit adalah aitem dengan pilihan dikotomi yang merupakan aitem pengantar untuk aitem berikutnya namun tetap dianggap sebagai aitem yang dapat mengukur kewargaan digital. Sedangkan aitem misfit lainnya diperbaiki kontennya sebelum dilakukan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis komparasi yaitu *mann-whitney* dengan bantuan program SPSS 23. Pemilihan teknik ini berdasarkan pertimbangan tidak terpenuhinya uji asumsi normalitas dan homogenitas. Nilai p pada uji normalitas adalah 0,000 sedangkan nilai p pada uji homogenitas penelitian ini adalah 0,001 sedangkan data dikatakan normal dan homogen apabila $p > 0,05$, sehingga uji perbedaan yang dilakukan harusnya dengan teknik non parametrik yaitu *mann-whitney* (Sheskin, 2003). Selain itu, peneliti juga melakukan tabulasi silang antara kategorisasi aspek kewargaan digital dengan jenis kelamin sehingga diperoleh pengetahuan mengenai aspek kewargaan digital yang lemah dan yang kuat pada laki-laki dan perempuan.

Pada fase kualitatif, peneliti melakukan FGD terhadap enam kelompok siswa dari MAN 1 dan MAN 2 untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam mengenai gambaran kewargaan digital yang terdiri dari 36 orang siswa (18 laki-laki dan 18 belas perempuan) sehingga diperoleh data mengenai perspektif gender mengenai kewargaan digital. Penentuan responden FGD melalui review dan analisa terhadap hasil survey kuantitatif, maka peneliti menemukan pola jawaban responden. Analisis data pada kualitatif ini melewati proses verifikasi data, transkripsi, koding dan kategorisasi, serta interpretasi terhadap hasil temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji beda kewargaan digital ditinjau dari jenis kelamin menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kewargaan digital antara laki-laki dan perempuan dengan nilai p 0,002 ($p < 0,05$). Dari nilai mean bisa dilihat bahwa siswa perempuan memiliki nilai 28,17, sementara laki-laki mempunyai 26,77. Ini berarti bahwa perempuan memiliki kemampuan kewargaan digital yang lebih baik daripada laki-laki. Hal tersebut juga dapat dilihat dari Tabel 2:

Tabel 2. Tabulasi Silang Kategorisasi Kewargaan Digital dengan Jenis Kelamin

Kategori	Perempuan	Laki-laki	Total
Rendah	7 2,77%	16 11,35%	23
Sedang	121 47,83%	78 55,32%	199
Tinggi	125 49,41%	47 33,33%	172
Total	253	141	394

Tabel di atas menunjukkan bahwa kecenderungan hasil kategori mengindikasikan bahwa perempuan cenderung menunjukkan kemampuan kewargaan digital yang lebih baik dibandingkan laki-laki, namun laki-laki lebih sering terlibat dalam dunia digital (Gayatri dkk.,

2015). Hal ini juga ditunjukkan pada salah satu kelompok FGD Siswa MAN 1 Kota Bandung yang menunjukkan bahwa durasi penggunaan internet terutama di rumah:

“*uh, antara 2-3 jam biasanya*” (Perempuan, As)
“*3-4 jam*” (Laki-laki, Yg)

Keterlibatan dalam dunia digital adalah hal yang berbeda dengan kemampuan sebagai warganegara digital. Kemampuan kewargaan digital yang baik ditunjukkan dengan kemampuan dalam memanfaatkan dan menggunakan teknologi digital dengan efektif dan efisien tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain (Searson et al., 2015). Azali dan Damayanti (2019) menjelaskan bahwa perempuan sebenarnya memiliki potensi dalam teknologi digital, namun kesempatan mereka untuk memperkuat literasi digital lebih sedikit dibandingkan laki-laki.

Tingginya kewargaan digital perempuan dibandingkan laki-laki dapat disebabkan karena laki-laki menunjukkan kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, hal ini dapat terjadi karena perempuan memiliki supervisi yang lebih baik dari orangtua (Lyons, 2012). Sebagian besar orangtua merasa bahwa anak perempuan memerlukan supervisi dan pengawasan yang lebih besar daripada anak laki-laki karena stereotip bahwa perempuan adalah makhluk lemah, tidak dapat menjaga diri sendiri dan sering menjadi objek kekerasan selalu menjadi isu utama bagi orangtua dan masyarakat. Hal ini juga ditunjukkan oleh orangtua salah satu siswa yang tidak memberikan fasilitas *smartphone* kepada anak perempuannya karena dikhawatirkan akan mengganggu:

“*ya belum dibolehin, nanti kalau udah jelas, sekarang fokus belajar dulu, jadi misalkan kalau punya HP, jadi karena HP terus, belajar jarang, gitu*” (Perempuan, An)

Sebagaimana dijelaskan di atas, secara keseluruhan perempuan menunjukkan kewargaan digital lebih baik daripada laki-laki. Namun, jika dilihat pada masing-masing aspek kewargaan digital pada perempuan dan laki-laki maka perbedaan kewargaan antara laki-laki dan perempuan terdapat pada aspek *digital security*, *digital etiquette*, *digital diversity and tolerance* dan *digital religiosity and cultural foundation*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3: Hasil Uji Mann Whitney Aspek Kewargaan Digital dengan Jenis Kelamin

Aspek Kewarganegaran Digital	p	Keterangan
Digital Wellbeing	0,176	Tidak signifikan
Digital Right and Responsibility	0,075	Tidak signifikan
Digital Security	0,021	Signifikan
Digital Etiquette	0,030	Signifikan
Digital Diversity and Tolerance	0,011	Signifikan
Digital Civic Involvement	0,177	Tidak signifikan
Digital Religious and Cultural Foundation	0,000	Signifikan

Meskipun hasil di atas menunjukkan bahwa terdapat tiga aspek yang tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan, namun ketika dilakukan hasil tabulasi silang antara kategorisasi aspek kewargaan digital dengan jenis kelamin maka kita dapat mengetahui bahwa ketiga aspek tersebut sebenarnya berpotensi untuk berbeda.

Tabel 4: Tabulasi Silang Aspek Kewargaan Digital dengan Jenis Kelamin

Kategori	Dig Wellbeing	Dig. Right and Res	Dig. Security	Dig. Etiquette	Dig. Div and Tolerance	Dig. Civic Involve	Digital Religious and CF
Rendah							
P	79 31,23%	7 2,77%	6 2,37%	36 14,22%	0 0%	45 17,79%	19 7,51%
L	31 21,99%	7 4,96%	12 8,51%	29 20,57%	5 3,55%	34 24,11%	28 19,86%
Sedang							
P	87 34,39%	152 60,08%	30 11,86%	95 37,55%	43 17%	150 59,29%	45 17,79%
L	56 39,72%	88 62,41%	19 13,48%	56 39,72%	33 23,40%	78 55,32%	38 26,95%
Tinggi							
P	87 34,39%	94 37,15%	217 85,77%	122 48,22%	210 83%	58 22,92%	189 74,70%
L	54 38,3%	46 32,62%	110 78,01%	56 39,72%	103 73,05%	29 20,57%	75 53,19%
Total	394	394	394	394	394	394	394

Tabel di atas menunjukkan bahwa perempuan lemah dalam hal *digital wellbeing*, sedangkan laki-laki lebih lemah pada aspek *digital civic involvement*. Baik perempuan ataupun laki-laki menunjukkan bahwa mereka memiliki *digital security* yang kuat. Lemahnya perempuan dalam aspek *digital wellbeing* dapat disebabkan karena laki-laki memiliki regulasi emosi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan (Hasmarlin & Hirmaningsih, 2019). Regulasi emosi memiliki pengaruh pada *wellbeing* seseorang (Rakhmawaty, Afiatin, & Rini, 2011). Ketika individu memiliki regulasi emosi yang baik maka ketika menjadi warga negara digital, ia akan memiliki kesadaran akan hal-hal yang merugikan bagi dirinya, misalnya apa yang akan membuatnya merasakan suatu emosi dan bagaimana meredakan emosi yang dirasakan sehingga ia dapat memanfaatkan teknologi digital secara menguntungkan dan dapat menghindari hal-hal yang merugikan baik fisik ataupun psikologis. Selain itu perempuan dilaporkan merasa frustrasi, marah dan sedih karena sering menjadi korban *cyberbullying* (Donegan, 2012).

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa pada aspek *digital wellbeing*, siswa laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan siswa perempuan, sedangkan pada aspek *digital right and responsibility*, *digital security*, *digital etiquette*, *digital diversity and tolerance*, *digital civic involvement* dan *digital*

religious and cultural foundation, siswa perempuan lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki. Terkait dengan aspek *digital civic involvement*, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jones & Mitchel (2016) menunjukkan bahwa perempuan lebih memiliki rasa hormat dan terlibat secara aktif dalam dunia digital dalam perbincangan tentang peran mereka sebagai warga negara yang baik, berperan mewujudkan upaya membangun masyarakat dan bangsa sekitar dan umum dibandingkan laki-laki.

Berkaitan dengan *digital right and responsibility*, meskipun Tabel 3 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal tersebut, namun pada Tabel 4 tampak ada kecenderungan perempuan memiliki *digital right and responsibility* yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini juga terkonfirmasi dari pola respon subjek. Hasil analisis FGD menunjukkan bahwa *digital right and responsibility* dapat dilihat dari: (1) kepemilikan gadget meliputi fasilitas yang dimiliki secara pribadi (*handphone*) dan sekolah (*wifi*, laboratorium komputer, proyektor); (2) akses digital meliputi mudah tidaknya mengakses internet; (3) penggunaan gadget, yaitu untuk *game*, *chatting*, *searching*, *download*; (4) pembelajaran daring meliputi penggunaan teknologi internet dalam pembelajaran (pengajaran, penugasan, kuis), kontrol guru, plagiasi, kurikulum, penyalahgunaan teknologi (*menyontek*); (5) pengaturan penggunaan gadget meliputi pengaturan dari diri sendiri, orangtua dan sekolah; (6) *posting content dan posting limitation*; (7) Sikap terhadap informasi yang diterima; dan (8) *commerce* yaitu memanfaatkan media digital untuk transaksi.

Hasil analisis statistik tidak menunjukkan adanya perbedaan *digital right and responsibility* pada siswa laki-laki dan perempuan. Namun terdapat pola jawaban yang berbeda. Laki-laki mengungkapkan batasan-batasan apa saja yang boleh diposting dan tidak di media sosial (*posting limitation*), memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara belanja *online* yang aman seperti bayar ditempat, lihat ulasan, dan sebagainya. Sedangkan siswa perempuan lebih memilih untuk tidak berbelanja *online* karena khawatir akan tertipu dan hanya mengungkapkan apa saja yang sering mereka posting di media sosial tanpa menjelaskan mana yang boleh mana yang tidak. Hal ini juga dapat terlihat pada salah satu FGD:

“Kadang suka was was juga takutnya ga aman..... (Perempuan, As)

“Takutnyakan ketipu. Jadi mending langsung beli ketokonya langsung kan ? masih banyak disekitar bandung toko-toko apa gitu” (Perempuan, An)

“Ketipu bahan...” (Perempuan, St)

“Sekarang mah udah ada yang gitu juga kan, online bayar ditempat (Laki-laki, Yg)

“ Kalau aku sih lihat dulu...pertama foto, kedua rating, mm. terus sama ulasan. Dilihat dulu ulasannya” (Laki-laki, Fk)

Pola respon oleh responden di atas menunjukkan bahwa laki-laki memiliki beberapa cara untuk memastikan apakah barang yang digunakan sesuai dengan yang diinginkan sedangkan pola jawaban responden perempuan menunjukkan bahwa mereka tidak menunjukkan langkah-langkah berbelanja *online* yang tepat, bahkan memutuskan untuk tidak menggunakan *online* dalam berbelanja. Artinya, perempuan belum siap dalam hal ini menerima hak dan tanggungjawab sebagai warga digital yang tidak dapat menghindari perkembangan teknologi dalam transaksi perdagangan *online*. Sebagai warga digital, seharusnya perempuan dapat memahami implikasi dari realitas komersial ruang *online* sebagai salah satu kompetensi yang harus dihadapi untuk mempertahankan otonomi mereka sebagai warga digital (Mattson & Curran, 2018).

Pada aspek *digital right and responsibility*, tema terkait pentingnya kurikulum digital juga muncul dan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Siswa laki-laki memandang bahwa kurikulum tersebut perlu ada, agar berhati-hati dalam menggunakan teknologi. Namun demikian, mereka memandang tidak perlu ada mata pelajaran khusus, karena masih dapat disisipkan. Sedangkan siswa perempuan beranggapan bahwa bermedia sosial tidak masalah asal bisa jaga diri. Mereka meyakini bahwa kurikulum kewargaan digital untuk menambah ilmu, dan bersifat tambahan sekali sebulan. Dari pola jawaban antara subjek laki-laki dan perempuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laki-laki lebih memandang penting perlunya kurikulum digital daripada perempuan. Hal ini dapat terjadi karena kesempatan perempuan untuk memperkuat literasi digital lebih sedikit dibandingkan laki-laki (Azali dan Damayanti, 2019) sehingga persepsi mereka tentang kurikulum digital juga menunjukkan bahwa hal tersebut tidak terlalu penting.

Pada aspek *digital wellbeing*, siswa laki-laki menunjukkan kesejahteraan digital lebih tinggi dibandingkan dengan siswa perempuan meskipun secara statistik perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Hal ini juga terlihat pada hasil FGD yang menunjukkan bahwa *digital wellbeing* meliputi aspek fisik dan psikologis. Laki-laki menunjukkan kesejahteraan baik secara fisik, yaitu bersih dan rapi, maupun kesejahteraan psikologis yang meliputi rasa nyaman dan senang. Sedangkan perempuan merasa pusing dalam penggunaan proyektor dan merasa tidak senang ketika guru menjelaskan dengan menggunakan proyektor, namun perasaan senang muncul ketika proyektor dan internet digunakan untuk kuis *online* yang ditampilkan melalui proyektor demikian juga halnya siswa laki-laki. Dengan demikian, respon laki-laki dan perempuan terkait kuis *online* yang diberikan guru melalui proyektor adalah sama, yaitu senang. Berikut kutipan FGD terkait hal tersebut:

“Senang karena mudah, lebih cepat memberikan informasi, ketika ada kuis online” (laki-laki)

“Seneng kalau digunakan untuk kuis online” (Perempuan)

“Nyaman tidak nyaman, Guru jadi tidak aktif menjelaskan dan tidak sampai intinya, pusing” (perempuan)

Selain karena laki-laki memiliki regulasi emosi yang tinggi (Hasmarlin dan Hirmaningsih, 2019), ketahanan fisik laki-laki lebih kuat daripada perempuan (Amriani, 2011). Dua hal ini menopang kepercayaan yang tinggi pada mereka dalam menggunakan media digital dan membuat *digital wellbeing* mereka tidak mengalami masalah berarti.

Digital Security pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki sebagaimana hasil uji *mann whitney* dan tabulasi silang di atas. Seseorang dikatakan memiliki *digital security* yang tinggi apabila ia mampu menjaga alat-alat digital dengan tidak merusaknya, menjaga diri sendiri dan orang lain seperti tidak sembarangan memberikan data pribadi diri sendiri dan orang lain yang berisiko akan disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (Ribble, 2011). Hasil FGD terkait aspek ini menunjukkan bahwa digital security dapat dilihat dari: (1) identitas personal yang dimunculkan meliputi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat email, nomor *handphone*, dan foto asli; (2) pertimbangan dalam memposting informasi pribadi; (3) kata sandi akun meliputi kerahasiaan, dan penggantian kata sandi secara berkala. Secara umum subjek tidak mudah memberikan kata sandi kepada orang lain, namun jika subjek merasa orang tersebut adalah teman yang sangat dipercaya maka ia bisa memberikannya. Selain itu, kata sandi juga akan diberikan jika orangtua meminta. Terkait penggantian kata sandi, subjek tidak menggantinya secara berkala; kata sandi diganti hanya ketika ada yang meretas akunnya dan jika pernah membuka akun pada alat lain.

Perbedaan *digital security* antara laki-laki dan perempuan adalah, laki-laki lebih lengkap dalam mencantumkan informasi pribadi di akun media sosial:

“Paling yang kayak Bandung yang gitu aja. Jadi nggak, nggak lengkap Nggak. Uh, rabasia. Jadi- jadi nggak ada yang tau” (Perempuan, St)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perempuan mencantumkan informasi yang seperlunya saja di media sosial dan menjaga kerahasiaan kata sandi alat digital karena dianggap privasi. Tingginya *digital security* pada perempuan dapat berkaitan dengan kekhawatiran perempuan terhadap perilaku pelecehan, intimidasi, merasa diawasi, penyalahgunaan data atau kejahatan dunia maya (Mason & Magnet, 2012), sehingga perempuan lebih berhati-hati dalam menggunakan media digital terutama internet.

Perempuan juga menunjukkan *Digital Etiquette* yang lebih tinggi daripada laki-laki. Etika digital ditunjukkan dari etika dalam berinteraksi di media sosial meliputi penggunaan bahasa santun, tidak bercanda berlebihan, tidak menggunakan bahasa yang kurang mendidik, memperingatkan teman yang berkata kasar, tidak boleh komentar negatif, jika ada yang bertengkar tidak boleh mengikuti, tidak boleh langsung menghakimi foto orang, dan tidak

mencaci maki. Selain itu etika digital juga ditunjukkan dari pandangan subjek mengenai pentingnya etika dalam bermedia sosial. Subjek beranggapan bahwa etika harus dijaga, dapat mempengaruhi harga diri, menunjukkan jati diri, dan dapat menyinggung orang lain. Jika seseorang berperilaku sopan maka orang juga akan memperlakukannya dengan sopan. Kesopanan harus dijaga, menurut mereka, agar tidak terjadi perselisihan, dan berinteraksi jadi lebih mudah.

Terkait dengan etika digital, subjek perempuan memiliki pengalaman dikasari tapi tidak membalas, pernah dibohongi, pernah digoda cowok, dan ditelepon cowok tidak dikenal. Artinya, perempuan lebih memiliki kesadaran bahwa tidak hanya mereka yang berada di dunia digital sehingga perempuan lebih memperhatikan norma dan etika dalam berinteraksi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mason dan Magnet (2012), perempuan sering menjadi korban dalam kejahatan di dunia digital yang membuat mereka cenderung berhati-hati dalam menggunakan media digital. Dengan demikian, mereka berusaha untuk menjaga etika dalam dunia digital agar tidak dirundung. Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu responden FGD:

“Pernah sih dikasarin, tapi nggak di respon balik. Cuma ngingetin lagi aja. Soalnya kalau di respon balik, dianya malah tambah marah” (Perempuan, As)

Pernyataan responden di atas menunjukkan bahwa meskipun ia mendapatkan perkataan kasar dari warga digital yang lain, ia berusaha untuk tidak membalas dengan perkataan kasar. Selain cara tersebut, biasanya perempuan menghindari konflik di media sosial dengan tidak memberikan “like” dan komentar pada foto ataupun postingan yang terkait isu kontroversial (Cirucci, 2018).

Temuan berikutnya dalam penelitian ini adalah bahwa *digital diversity and tolerance* perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan menunjukkan kesadaran bahwa di dunia digital terdapat orang lain yang memiliki latarbelakang budaya, gender, status sosial ekonomi, agama yang berbeda-beda sehingga mereka berupaya tidak menyinggung orang lain dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cirucci (2018) menunjukkan bahwa perempuan tidak suka bertentangan dengan teman yang berbeda pendapat dengannya. Hal ini juga diungkapkan salah seorang responden FGD:

“Pernah, kayak, yang berbeda melihat. Kan harus saling toleransi juga yang berbeda keyakinan. Ya, toleransi aja nggak usah komentar yang nggak-nggak” (Perempuan, As)

Hasil FGD menunjukkan bahwa *digital diversity and tolerance* dapat dilihat dari variasi teman yang dimiliki, pembelajaran toleransi melalui internet, sikap terhadap postingan orang lain terkait agama dan budayanya serta sikap terhadap postingan yang membela tokoh agama Islam. Pada dasarnya subjek memiliki teman baik yang berbeda agama maupun yang berbeda budaya. Akan

tetapi, terkait permintaan pertemanan dari orang lain yang berbeda agama, subjek memiliki pertimbangan khusus, yaitu hanya akan menerima permintaan pertemanan dari orang yang berbeda agama yang sudah dikenalnya. Terkait dengan postingan orang lain mengenai agama dan budayanya subjek tidak mempermasalahkannya. Subjek merasa bahwa jika ada orang lain memposting tentang ajaran agamanya, sekalipun berupa ajakan untuk mengikuti agamanya merupakan hak bagi setiap orang asalkan tidak memaksa. Siswa di kedua MAN mempunyai pandangan positif terkait orang lain yang memposting budayanya. Mereka berpendapat bahwa hal tersebut dapat menambah wawasan dan mengenal budaya lain. Meskipun demikian, batasan toleransi dalam perbedaan agama dan budaya larangan memposting hinaan terhadap agama lain dan tokohnya. Subjek menunjukkan beragam reaksi yaitu secara emosi antara lain merasa tidak enak, sakit hati, dan marah, jika ada yang menghina agamanya. Sedangkan perilaku yang akan dimunculkan berbeda antar satu siswa dengan siswa lain. Siswa perempuan lebih menunjukkan perilaku aktif dalam menyikapi postingan yang berisikan hinaan terhadap agama dibandingkan laki-laki seperti memperingati orang yang bersangkutan melalui jaringan pribadi dan memberikan konfirmasi. Ada yang ingin melawan, memperingatkan orang yang memposting, bahkan ada yang hanya mendiarkannya saja. Selain itu, siswa perempuan menggunakan internet dalam belajar interaksi dalam bentuk *chatting* dengan orang beda agama, membaca dari postingan di internet, menonton youtube.

Digital religious and cultural foundation pada perempuan juga lebih tinggi dibandingkan laki-laki. *Digital religious and cultural foundation* dapat dilihat dari: (1) cara belajar agama, yaitu melalui internet; (2) media yang digunakan: Instagram, akun ustadz yang digemari, Youtube, Web TV, dan Google; (3) tema tentang keperempuanan (belajar tauhid, perzinahan, aurat); (4) tema tentang kelelakian (belajar tata krama, adab dan cara menghormati, kiamat, debat tentang agama); (5) memiliki tokoh agama favorit; (6) pertimbangan dalam memilih tokoh agama termasuk materi ceramah, latar belakang pendidikan ustadz/ah, dan gaya penyampaian ceramah; (7) sikap terhadap dakwah online; (8) sikap terhadap postingan ibadah yang dilakukan oleh orang lain.

Tingginya aspek *digital religiosity and cultural foundation* pada perempuan dibandingkan laki-laki karena perempuan memiliki tingkat religiusitas yang lebih tinggi daripada laki-laki (Khairudin & Mukhlis, 2019). Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya tentang toleransi. Artinya, penelitian ini menunjukkan bahwa siswa perempuan yang memiliki pemahaman keagamaan baik akan berkait erat dengan sikap toleransi mereka. Semakin mereka memanfaatkan media digital untuk pengembangan keagamaan mereka secara tepat, semakin mungkin mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang toleran.

KESIMPULAN

Dengan menggunakan *mixed methods*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan kewargaan digital antara siswa perempuan dan laki-laki di MAN 1 dan 2 Kota Bandung. Pada tahap kuantitatif, studi ini menemukan secara meyakinkan bahwa ada perbedaan signifikan kemampuan kewargaan digital antara keduanya. Secara umum, siswa perempuan di kedua madrasah tersebut mempunyai kemampuan yang lebih baik, walaupun dalam beberapa aspek kewargaan digital para siswa laki-laki menampakkan kemampuan lebih tinggi. Tahapan kualitatif mengkonfirmasi temuan ini secara lebih dalam dengan penjelasan-penjelasan sesuai yang diungkapkan oleh responden. Kemampuan mereka paling tinggi ditunjukkan pada aspek *digital security*, *digital etiquette*, *digital diversity and tolerance*, *digital civic involvement* dan *digital religious and cultural foundation* yang secara umum berarti bahwa para siswa perempuan dalam menggunakan media digital lebih berhati-hati dan bertanggung jawab, menjaga etika, mengedepankan toleransi dan menghargai keragaman, terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kewargaan, dan memanfaatkan digital media untuk membina sikap beragama mereka. Sementara itu, dalam hal *digital wellbeing*, siswa laki-laki menunjukkan kemampuan yang lebih baik karena tingkat kepercayaannya yang tinggi dalam menggunakan media digital. Demikian juga, dalam aspek *digital access*, siswa laki-laki mempunyai kesempatan yang lebih untuk mengakses dunia digital dibandingkan dengan perempuan. Ringkasnya, siswa laki-laki mempunyai kesempatan akses yang lebih luas, namun dalam hal memanfaatkan kesempatan tersebut, mereka mencerminkan sikap dan perilaku yang kurang hati-hati dan menggunakannya dalam hal-hal yang kurang bermanfaat dibandingkan apa yang dilakukan oleh siswa perempuan. Sebaliknya, siswa perempuan dengan kesempatan akses yang lebih terbatas mampu menunjukkan kedewasaan dalam penggunaan media digital dan berinteraksi penuh tanggung jawab dalam dunia maya.

Pada satu sisi, kematangan dalam bersikap terkait dengan kemampuan kewargaan digital ini ditunjukkan oleh siswa-siswa perempuan. Hal ini menunjukkan kedewasaan mereka yang merupakan hasil pendidikan baik di rumah, sekolah atau bahkan interaksi positif mereka dalam dunia digital. Namun pada sisi lain, rendahnya akses yang tersedia untuk mereka mengindikasikan masih adanya sikap pembedaan oleh lingkungan (dalam penelitian ini adalah orangtua) terhadap mereka sebagai perempuan. Mereka dianggap makhluk lemah dan rentan jika dibiarkan begitu saja berinteraksi di dunia digital. Oleh karena itu, perilaku “policing” ditunjukkan oleh orangtua mereka dalam bentuk membatasi jam akses dan bahkan tidak memberikan fasilitas handphone sama sekali. Perlakuan yang sama, dalam penelitian ini, tidak ditemukan terhadap para siswa laki-

laki. Walaupun perlakuan tersebut ada benarnya jika ditinjau dari perspektif keamanan, akan tetapi kesetaraan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan tetap harus diutamakan.

Dari penelitian ini, jelas bahwa pendidikan kewargaan digital ini penting untuk dilakukan agar para siswa dapat mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin sehingga bisa memanfaatkan teknologi digital ini secara lebih tepat, bermanfaat dan bertanggungjawab. Pengembangan kurikulum kewargaan digital yang tidak membedakan karakteristik gender perlu digagas agar pendidikan kewargaan digital ini dapat dilakukan secara terstruktur dan terukur. Pentingnya kurikulum ini semakin bertambah mempertimbangkan perkembangan teknologi digital yang makin pesat dan kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alazemi, A. F., Sa'di, I. T., & Al-Jamal, D. A. H. (2019). Effects of digital citizenship on EFL students' success in writing. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 18(4), 120–140. <https://doi.org/10.26803/ijlter.18.4.7>
- Backgrounder, T. (2012). *Gender and Digital Life Gender and Digital Life tips for ...* 1–2.
- Cirucci, A. M. (2018). A New Women's Work: Digital Interactions, Gender, and Social Network Sites. *International Journal of Communication*, 12(0), 23.
- Donegan, R. (2012). Bullying and Cyberbullying: History, Statistics, Law, Prevention and Analysis. *The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications*, 3(1), 33–42.
- Gayatri, G., Rusadi, U., Meiningsih, S., Mahmudah, D., Sari, D., & Nugroho, A. C. (2015). Perlindungan Pengguna Media Digital Di Kalangan Anak Dan Remaja Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika*, 6(1), 1–18.
- Hasmarlin, H., & Hirmaningsih, H. (2019). Self-Compassion dan Regulasi Emosi pada Remaja. *Jurnal Psikologi*, 15(2), 148. <https://doi.org/10.24014/jp.v15i2.7740>
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2014). White House conference on bullying prevention: Overview of cyberbullying. *Student Bullying: Federal Perspectives and Reference Materials*, (January 2014), 105–120.
- Jones, L. M., & Mitchell, K. J. (2016). Defining and measuring youth digital citizenship. *New Media and Society*, 18(9), 2063–2079. <https://doi.org/10.1177/1461444815577797>
- Khairudin, K., & Mukhlis, M. (2019). Peran Religiusitas dan Dukungan Sosial terhadap Subjective Well-Being pada Remaja. *Jurnal Psikologi*, 15(1), 85. <https://doi.org/10.24014/jp.v15i1.7128>

- Lyons, R. (2012). Investigating Student Gender and Grade Level Differences in Digital Citizenship Behavior. *ProQuest Dissertations and Theses*, 153. Retrieved from <https://search-proquest-com.ezp.waldenulibrary.org/pqdtlocal1005747/docview/1038378905/6DF0CB21B5FA4C4DPQ/1?accountid=14872%0Ahttp://eagle.sbuniv.edu:2048/login?url=http://search.proquest.com/docview/1038378905?accountid=14196%5Cnhttp://resolver.ebscohost>
- Mardianto. (2018). Peran Pendidikan Digital Citizenship Untuk Pencegahan Perilaku Ujaran Kebencian Siswa di Media Sosial. *Membangun Manusia Indonesia.-Yang Holistik Dalam Kebhinekaan, 2018*, 523–538.
- Mason, C., & Magnet, S. (2012). Surveillance studies and violence against women. *Surveillance and Society*, 10(2), 105–118. <https://doi.org/10.24908/ss.v10i2.4094>
- Mattson, K., & Curran, M. B. F. X. (2018). Digital Citizenship Education. In *International Handbook of Media Literacy Education*. <https://doi.org/10.4324/9781315628110-13>
- Azali, Damayanti. (2019). *Perempuan , Literasi Digital , dan Ketimpangan*.
- Rakhmawaty, A., Afiatin, T., & Rini, R. I. S. (2011). Pengaruh Pelatihan Regulasi Emosi Terhadap Peningkatan Subjective Well Being Pada Penderita Diabetes Mellitus. *Jurnal Intervensi Psikologi (JIP)*, 3(2), 187–209. <https://doi.org/10.20885/intervensipsikologi.vol3.iss2.art3>
- Ribble, M. (2011). Digital Citizenship in Schools. *An Excerpt from Digital Citizenship in Schools 2nd Edition*, 3777, 1–32. https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2012.01378_9.x
- Searson, M., Hancock, M., Soheil, N., & Shepherd, G. (2015). Digital citizenship within global contexts. *Education and Information Technologies*, 20(4), 729–741. <https://doi.org/10.1007/s10639-015-9426-0>
- Sheskin, D. J. (2003). Parametric and non parametric statistical procedures: Third edition. *Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures: Third Edition*, 1–1193.
- Sumintono, B., Widiharso, W. (2015). *Aplikasi pemodelan rasch: pada asesmen Pendidikan*. Cimahi: Trim Kominikata